

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas dinamika kekuasaan yang terbentuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Tirta Investama di Desa Juwiring, yang menunjukkan bahwa CSR bukan sekadar instrumen pembangunan yang netral, melainkan arena kompleks di mana struktur kekuasaan diproduksi, direproduksi, dan ditransformasi melalui interaksi dinamis antara berbagai aktor.

Dalam dimensi strukturisasi kekuasaan, program CSR telah menciptakan manifestasi konkret dari konsep dualitas struktur Giddens, di mana struktur kekuasaan yang ada membentuk pelaksanaan program CSR, sementara pada saat yang sama program CSR justru mentransformasi struktur kekuasaan yang telah ada sebelumnya. Transformasi ini terlihat dalam tiga aspek utama: pertama, pergeseran dari pengaturan berbasis aturan formal menuju kesepakatan informal yang lebih fleksibel; kedua, evolusi mekanisme pengambilan keputusan dari pola hierarkis menuju model partisipatif melalui forum multistakeholder; dan ketiga, pembentukan struktur otorisasi baru seperti Forum Relawan Irigasi yang mengubah tata kelola sumber daya air.

Interelasi aktor dalam program CSR menciptakan konfigurasi kekuasaan yang unik dengan pola hubungan segitiga antara PT Tirta Investama sebagai penyedia dana, Yayasan Gita Pertiwi sebagai implementator dengan kekuasaan pengetahuan, dan pemerintah desa

dengan otoritas legitimasi formal. BAPPERIDA dan Dispermasdes berperan sebagai mediator kekuasaan yang menjembatani kepentingan berbagai pihak, sementara Yayasan Gita Pertiwi menjadi agen transformasi yang secara signifikan mempengaruhi dinamika kekuasaan melalui penciptaan "local hero" dan pembentukan diskursus pembangunan berkelanjutan.

Program CSR juga telah menciptakan praktik sosial baru dan rutinisasi yang menjadi medium beroperasinya kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengelolaan irigasi, produksi pupuk organik, dan forum-forum program tidak hanya mengubah pola interaksi sosial tetapi juga menciptakan hierarki baru berdasarkan partisipasi dan penguasaan pengetahuan. Legitimasi kekuasaan dibangun melalui narasi pemberdayaan dan konservasi lingkungan yang membingkai intervensi program sebagai "pendampingan" daripada "bantuan", sehingga meminimalkan kesan dominasi.

Dalam menghadapi struktur kekuasaan yang terbentuk, Desa Juwiring tidak berperan sebagai penerima pasif melainkan mengembangkan strategi negosiasi yang kompleks dan multidimensional. Mobilisasi dukungan masyarakat menjadi fondasi negosiasi melalui pembangunan konsensus internal, legitimasi representasi, dan pengelolaan resistensi. Meskipun demikian, proses ini tidak sepenuhnya inklusif dan masih menunjukkan kesenjangan partisipasi antara kelompok yang terlibat aktif dengan mereka yang termarginalkan.

Strategi negosiasi multipihak yang dikembangkan desa mencerminkan upaya adaptif untuk menavigasi kompleksitas struktur kekuasaan. Desa menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan dalam negosiasi dengan PT Tirta Investama, membangun aliansi strategis dengan Yayasan Gita Pertiwi untuk mengakses pengetahuan dan jaringan, serta memposisikan diri secara cermat dalam hubungan dengan institusi pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan struktural.

Negosiasi berbasis sumber daya menunjukkan bagaimana desa mentransformasi aset yang dimiliki meliputi air, pertanian, pengetahuan lokal, dan jaringan sosial, menjadi instrumen politik dalam menghadapi kekuatan korporasi. Pengelolaan air dan transformasi praktik pertanian berkelanjutan tidak hanya meningkatkan otonomi ekonomi tetapi juga memperkuat posisi tawar desa dalam negosiasi. Transformasi pengetahuan lokal menjadi keahlian dalam pertanian berkelanjutan memberikan legitimasi baru bagi petani dalam struktur kekuasaan yang terbentuk.

Artikulasi kepentingan lokal dalam program CSR menunjukkan kemampuan desa untuk secara aktif membentuk hasil program agar selaras dengan aspirasi dan kebutuhan lokalnya. Melalui integrasi agenda pembangunan desa, negosiasi distribusi manfaat, dan transformasi program menjadi aset jangka panjang, desa berupaya mengubah CSR dari intervensi temporer menjadi perubahan sistemik yang berakar dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menunjukkan bahwa teori strukturalisasi Giddens dapat diterapkan secara produktif dalam konteks CSR untuk memahami bagaimana struktur kekuasaan dan agensi saling membentuk. Temuan ini juga memperkaya pemahaman tentang "politik negosiasi" dalam konteks industri non-ekstraktif, menunjukkan bahwa komunitas lokal memiliki kapasitas untuk mengembangkan strategi negosiasi yang kompleks meskipun berhadapan dengan asimetri kekuasaan yang signifikan.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Program CSR

- a. Pengembangan mekanisme yang lebih inklusif untuk memastikan partisipasi seluruh elemen masyarakat, tidak hanya kelompok tani dan KWT tetapi juga pelaku usaha dan kelompok lain di desa.
- b. Penguatan koordinasi multi-level yang lebih efektif antara PT Tirta Investama, Yayasan Gita Pertiwi, BAPPERIDA, Dispermasdes, dan pemerintah desa untuk mengoptimalkan program CSR.
- c. Peningkatan transparansi dalam pemilihan penerima manfaat program untuk mengurangi potensi konflik dan kecemburuan sosial.

2. Bagi Pemerintah Desa

- a. Pengembangan regulasi desa yang lebih terstruktur terkait kerjasama dengan pihak eksternal, termasuk program CSR, untuk memberikan kerangka formal yang lebih jelas bagi implementasi program.
- b. Penguatan peran pemerintah desa sebagai mediator kepentingan masyarakat dalam negosiasi dengan korporasi dan LSM pendamping.
- c. Pembentukan forum yang lebih reguler untuk memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok di desa, termasuk yang tidak terlibat langsung dalam program CSR.

3. Bagi PT Tirta Investama

- a. Adopsi pendekatan CSR yang lebih transformatif dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan desa, tidak hanya pada intervensi teknis pertanian.
- b. Peningkatan keterlibatan langsung dengan masyarakat desa, tidak hanya melalui LSM pendamping, untuk memahami dinamika lokal secara lebih mendalam.
- c. Perluasan cakupan program ke kelompok-kelompok yang belum terlibat, seperti pelaku usaha non-pertanian dan generasi muda.

4. Bagi Yayasan Gita Pertiwi

- a. Peningkatan sensitivitas terhadap dinamika kekuasaan lokal dalam pendampingan program, termasuk pemetaan aktor dan

kepentingan yang lebih komprehensif sebelum implementasi program.

- b. Pengembangan strategi mediasi yang lebih efektif dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak, terutama kelompok yang termarginalkan.
- c. Penguatan kapasitas lokal dalam pengelolaan konflik dan negosiasi untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi dinamika pasca-program.
- d. Integrasi pengetahuan lokal dan perspektif kultural dalam desain dan implementasi program untuk meningkatkan relevansi dan keberlanjutan.

5. Bagi BAPPERIDA dan Dispermasdes

- a. Penguatan koordinasi antar OPD untuk mengoptimalkan sinergi program pemerintah dengan program CSR di tingkat desa.
- b. Pengembangan database program CSR yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.
- c. Peningkatan kapasitas pendampingan kepada desa dalam mengelola kerjasama dengan pihak eksternal, termasuk perusahaan pelaksana CSR.
- d. Pengembangan kerangka regulasi yang lebih kondusif untuk mendorong program CSR yang transformatif dan berkelanjutan.

6. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Studi komparatif di berbagai desa dengan konteks yang berbeda untuk memperkaya pemahaman tentang strukturisasi kekuasaan dan negosiasi dalam program CSR.
- b. Penelitian longitudinal untuk mengkaji keberlanjutan transformasi struktural yang dihasilkan program CSR dalam jangka panjang.
- c. Pengembangan metodologi yang lebih partisipatif untuk memahami perspektif kelompok yang termarjinalkan dalam program CSR.
- d. Eksplorasi lebih mendalam tentang peran pengetahuan dan nilai lokal dalam membentuk respons masyarakat terhadap program CSR.
- e. Analisis komparatif tentang perbedaan dampak program CSR berdasarkan jenis industri dan pendekatan implementasi yang digunakan.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan program CSR dapat berkontribusi lebih optimal pada transformasi struktural yang berkelanjutan di tingkat desa, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan inklusivitas dalam distribusi manfaat program